

**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA PEREMPUAN, DAN PEKERJA PROFESIONAL PEREMPUAN
TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI 10 PROVINSI INDONESIA TAHUN
2019-2024**

Raden Ajeng Ayu Tiara Girindraningrum; Inda Fresti Puspitasari
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Persoalan kemiskinan tetap menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia, terutama akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan layak. Perempuan sering kali terserap di sektor informal dengan upah rendah, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap jumlah penduduk miskin di 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada periode 2019–2024. Melalui pendekatan kuantitatif dengan data panel sebanyak 60 observasi. Variabel independen mencakup Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP), serta tenaga profesional perempuan (PROFESP), dengan variabel kontrol berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Gini Ratio. Berdasarkan hasil regresi melalui Uji Chow dan Uji Hausman, estimasi model yang terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin; TPAKP justru berpengaruh positif signifikan; sementara PROFESP berpengaruh negatif signifikan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas profesi perempuan lebih menentukan dibandingkan sekadar tingginya partisipasi kerja perempuan dalam menekan jumlah penduduk miskin. Maka dari itu, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemiskinan tidak cukup diturunkan melalui peningkatan partisipasi kerja perempuan secara kuantitatif, tetapi perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Selain itu, juga perlu kebijakan yang mendorong perluasan akses perempuan ke sektor formal.

Kata Kunci: Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja Perempuan, Tenaga Profesional Perempuan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Gini Ratio

Abstract

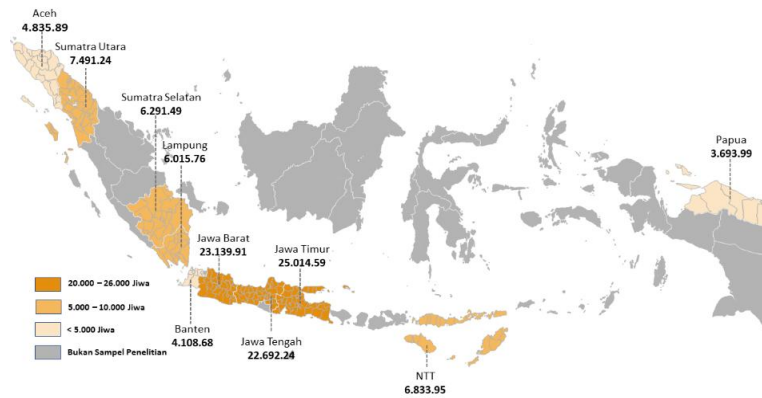
Poverty remains a major challenge to development in Indonesia, primarily due to limited access to education, health care, and decent employment. Women are often absorbed in the informal sector with low wages, thus limiting their contribution to family welfare. This study aims to analyze the effect of the quality of female labor force participation on the number of poor people in 10 provinces in Indonesia with the highest number of poor people in the 2019–2024 period. Using a quantitative approach with panel data of 60 observations. Independent variables include the Human Development Index (HDI), the female labor force participation rate (TPAKP), and female professional workers (PROFESP), with control variables in the form of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the Gini Ratio. Based on the regression results using the Chow Test and the Hausman Test, the selected model estimation is the Fixed Effect Model (FEM). The research findings indicate that the HDI has a significant negative effect on the number of poor people; TPAKP has a significant positive effect; while PROFESP has a significant negative effect. This confirms that the quality of women's professions is more decisive than simply high female labor force participation in reducing the number of poor people. Therefore, this study demonstrates that poverty reduction cannot be achieved solely through quantitative increases in women's labor force participation. It also requires

improvements in the quality of human resources through education, health, and skills. Furthermore, policies that encourage expanded women's access to the formal sector are also needed.

Keywords: Poverty, Human Development Index, Female Labor Force, Female Professionals, Gross Domestic Product, and Gini Ratio

1 PENDAHULUAN

Salah satu hambatan terbesar dalam agenda pembangunan di Indonesia adalah kemiskinan yang erat kaitannya dengan keterbatasan kebutuhan dasar serta hambatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak [1]. Keberhasilan suatu pembangunan tidak semata-mata diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat [2]. Kemiskinan memicu berbagai persoalan dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti penurunan kualitas sumber manusia, ketidakstabilan sosial politik, serta meningkatnya ketimpangan [3]. Mengacu pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi masyarakat miskin di Indonesia sempat menyentuh 9,22 persen pada bulan Maret 2019. Namun, seiring terjadinya pandemi COVID-19, angka kemiskinan ini mengalami peningkatan menjadi 10,19 persen pada bulan Maret 2021, mencerminkan dinamika kemiskinan yang fluktuatif sekaligus berbeda antarwilayah, di mana jumlah penduduk miskin justru didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa jika disandingkan dengan daerah lainnya [4]. **Gambar 1** menunjukkan rata-rata jumlah penduduk miskin pada 10 provinsi dengan kerentanan kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2019–2024. Wilayah tersebut menyumbang jumlah penduduk miskin tertinggi, sehingga analisisnya lebih representatif terhadap kondisi ketimpangan. Dari 10 provinsi tersebut, kerentanan tertinggi berpusat di wilayah Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara Papua, Banten, dan Aceh menunjukkan angka yang lebih rendah, namun relevan dalam menggambarkan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa kemiskinan di Indonesia diwarnai oleh ketimpangan wilayah yang terpusat pada wilayah dengan tingkat pembangunan yang belum seimbang.



Gambar 1. Rata-rata Jumlah Penduduk Miskin 10 Provinsi di Indonesia tahun 2019-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah populasi dan jumlah penduduk usia produktif, melainkan juga tergantung pada pemerataan distribusi pendapatan dan angka ketimpangan. Seperti di Pulau Sumatera, ketimpangan yang tinggi ternyata berkontribusi meningkatkan jumlah penduduk miskin [5]. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam persentase PDRB tidak menjamin adanya penurunan jumlah penduduk miskin. Sebagaimana terjadi di Sumatera Utara, kenaikan PDRB terbukti tidak selalu diikuti oleh penyusutan jumlah penduduk miskin [6]. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi tolok ukur pembangunan wilayah dalam menekan angka kemiskinan, dengan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan [7]. Kenaikan nilai IPM menunjukkan seberapa produktif masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sehingga mampu memutus rantai kemiskinan struktural maupun sistematis [8]. Pendidikan merupakan komponen utama IPM yang berfungsi memperluas akses penyerapan tenaga kerja yang berkualitas serta mendorong perolehan upah yang kompetitif [9]. Kondisi kesehatan yang baik memperpanjang usia produktif, sedangkan kesehatan yang buruk dapat menurunkan produktivitas dan memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi, seperti stunting yang terbukti menurunkan kualitas modal manusia dengan cenderung memiliki kemampuan belajar yang rendah dan meningkatkan kemiskinan [9]. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak, indikator yang digunakan adalah pengeluaran per kapita berbasis paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menurunkan kemiskinan [10]. [11] Menekankan bahwa garis kemiskinan global ditentukan melalui konsumsi per kapita berbasis PPP sehingga lebih akurat menggambarkan daya beli lintas negara. Akan tetapi, pengeluaran per kapita dapat berubah dipengaruhi oleh daya beli, inflasi, dan distribusi pendapatan, sehingga menjadi indikator

penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara merata [12]. Ketika kualitas modal manusia berada pada level yang rendah, hal tersebut akan memicu penurunan produktivitas kerja yang berdampak pada pendapatan yang diterima, sehingga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin [13]. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin melalui IPM tidak akan memberikan dampak yang maksimal tanpa adanya penyerapan tenaga kerja yang bersifat inklusif dan responsif terhadap gender [14]. Partisipasi perempuan yang rendah perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi [15], sementara pendidikan dan kesehatan terbukti meningkatkan produktivitas serta peluang kerja [16]. Meskipun partisipasi perempuan dalam tenaga kerja terbukti mempercepat pertumbuhan ekonomi [17]. Selama periode 2019-2024, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terus meningkat, dari 38,36% menjadi 39,71%, terutama di sektor formal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. [18] Membuktikan adanya korelasi negatif yang signifikan antara partisipasi perempuan dan jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, temuan [18] dan [19] justru menunjukkan bahwa kontribusi perempuan tidak cukup kuat karena dominasi sektor informal dan upah yang rendah. Kondisi ini diperburuk oleh beban ganda antara pekerjaan dan keluarga yang menurunkan kualitas pengasuhan dan pendidikan anak [20]. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang dan justru memperbesar risiko kemiskinan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berperan menekan jumlah penduduk miskin, tanpa pemerataan distribusi pendapatan, manfaat pembangunan tidak akan dirasakan secara merata, akibatnya kelompok miskin, termasuk perempuan, tidak sepenuhnya memperoleh manfaat positif dari pertumbuhan ekonomi [21]. Menurut [22], perempuan lebih rentan menghadapi kemiskinan dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan pada kesempatan pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan yang membuat banyak perempuan terserap ke dalam sektor informal yang minimnya perlindungan sosial dengan pendapatan yang rendah [23]. Padahal beberapa studi sebelumnya membuktikan bahwa perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan lebih baik mampu berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan [18]. [24] Tingkat pendidikan perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sementara partisipasi kerja perempuan tanpa dukungan kualitas pekerja tidak cukup kuat. Namun, peran perempuan ini tidak terlepas dari faktor struktural.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara jumlah penduduk miskin dengan kualitas partisipasi tenaga kerja perempuan. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan proporsi pekerja profesional perempuan sebagai

indikator kualitas partisipasi tenaga kerja perempuan dalam menjelaskan kemiskinan pada 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada periode 2019–2024.

2 METODE

Metode yang diterapkan peneliti adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis pengaruh variabel makroekonomi dan gender terhadap tingkat kemiskinan. Struktur data panel berbasis data sekunder diterapkan dengan mencakup wilayah amatan yang mencakup 10 provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode 2019 hingga 2024, sehingga menghasilkan 60 observasi secara metodologis sah dan mampu menghasilkan estimasi yang efisien [38]. Pemilihan provinsi tersebut dilakukan agar penelitian berfokus pada wilayah yang jumlah penduduk miskinnya tinggi, sehingga hasilnya relevan dengan kondisi nyata. Sumber data utama berasal dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi publikasi Indeks Pembangunan Manusia dan Statistik Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas).

Variabel dependen yang dianalisis adalah jumlah penduduk miskin, dengan pertimbangan bahwa indikator ini mampu menggambarkan beban riil kemiskinan antarwilayah. Sementara itu, variabel independen dalam model ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP), serta tenaga profesional perempuan (PROFESP) di Indonesia. Selain itu, model ini pun mengintegrasikan variabel kontrol yang secara empiris terbukti berkorelasi dengan fluktuasi angka kemiskinan, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Gini Ratio, guna menjaga kesahihan hasil regresi [39]. [40] Menekankan bahwa variabel kontrol penting dalam regresi berganda untuk menghindari bias pada model agar hubungan antarvariabel tetap akurat.

Tabel 1. Variabel Dependen dan Independen

No.	Variabel	Simbol	Definisi Oprasional	Satuan
1.	Jumlah Masyarakat Miskin	JMK	Total masyarakat dengan pengeluaran di bawah batas garis kemiskinan merujuk basis data rilis BPS (2019-2024)	Ribu Jiwa
2.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks komposit yang mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang dipublikasikan BPS (2019-2024)	Indeks
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	TPAKP	Persentase perempuan pada usia produktif yang terlibat di pasar kerja yang aktif bekerja/mencari kerja berdasarkan data BPS (2019-2024)	Persentase (%)

4.	Tenaga Profesional Perempuan	PROFESP	Proporsi kelompok perempuan yang terserap di sektor profesional/formal menurut data BPS (2019-2024)	Persentase (%)
5.	Gini Ratio (Kontrol)	GR	Indeks ketimpangan distribusi pendapatan yang dipublikasikan BPS (2019-2024)	Indeks
6.	Pertumbuhan PDRB (Kontrol)	PDRB	Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan PDRB atas harga konstan menurut BPS (2019-2024)	Persentase (%)

Persamaan model estimasi ekonometrika dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Log(JMK)}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{IPM}_{it} + \beta_2 \text{TPAKP}_{it} + \beta_3 \text{PROFP}_{it} + \beta_4 \text{GR}_{it} + \beta_5 \text{PDRB}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

LogJMK: Jumlah penduduk miskin

β_0 : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$: Koefisien

IPM : Indeks pembangunan manusia

TPAKP : Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan

PROFESP : Tenaga Profesional perempuan

GR : Gini Ratio

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

i : Observasi (10 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi)

t : Rentang Waktu (2019-2024)

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini diuji melalui tiga jenis pendekatan model, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects Model* (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). Pemilihan model terbaik ditentukan menggunakan Uji Chow dan Uji Hausman. Setelah model terbaik terpilih, langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil estimasi tidak bias. Selanjutnya dilakukan secara simultan (*F-test*), pengukuran koefisien determinasi (*Adjusted R²*), serta uji parsial (*t-test*), dengan menggunakan perangkat lunak EViews 12.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

(1). Uji Chow

Cross-section F (9,45) =20.471639; Prob.F (9,45) = 0.0000

(2). Uji Hausman

Cross-section Random $\chi^2 (5) = 26.582641$; Prob. $\chi^2 = 0.0001$

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 1, nilai probabilitas untuk Uji Chow adalah sebesar 0.0000. Nilai ini lebih kecil dari signifikansi α (0.05), maka hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Common Effect Model* (CEM). Langkah berikutnya adalah menentukan apakah model akan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dengan menerapkan Uji Hausman. Hasil pengujian ini memperlihatkan nilai probabilitas χ^2 sebesar 0.0001, yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari α (0.05). Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) kembali ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model estimasi terbaik untuk penelitian ini adalah FEM.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	IPM	TPAKP	PROFESP	GR	PDRB
IPM	1.000000	-0.563755	0.283476	-0.046302	0.432294
TPAKP	-0.563755	1.000000	-0.139496	0.029555	-0.195780
PROFESP	0.283476	-0.139496	1.000000	-0.784499	-0.100174
GR	-0.046302	0.029555	-0.784499	1.000000	0.518244
PDRB	0.432294	-0.195780	-0.100174	0.518244	1.000000

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Dari hasil Uji Multikolinearitas pada Tabel 2 di atas, tidak ada nilai korelasi antarvariabel yang melebihi 0,80. Sesuai dengan teori literatur relevan [38], multikolinearitas baru dianggap bermasalah jika korelasi antarvariabel independen melebihi 0,80. Maka semua angka pada tabel berada di bawah batas tersebut, sehingga model regresi ini dipastikan aman dan terbebas dari masalah multikolinearitas. Hal ini membuktikan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan tenaga profesional perempuan tidak saling berkorelasi kuat.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

	Nilai Durbin-Watson (DW)	Rentang Ideal	Kesimpulan
Durbin-Watson (DW)	2.099998	1.50-2.50	Bebas Autokorelasi

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Analisis uji autokorelasi dengan metode *Durbin-Watson*, didapatkan nilai DW sebesar 2.099998. Nilai ini berada dalam rentang antara 1.5 dan 2.5 ($1.5 < 2.12 < 2.5$), sehingga model regresi dalam penelitian ini terbebas dari gangguan autokorelasi. Temuan ini sejalan dengan [38] yang menegaskan bahwa nilai DW berada antara 1,5–2,5, sehingga tidak ada autokorelasi

dalam regresi. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi antarperiode waktu (2019-2024), Model estimasi ini layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis berikutnya.

Tabel 5. Hasil uji heteroskedastisitas

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.844732	1.136534	-0.743253	0.4612
IPM	0.012287	0.006467	1.899930	0.0639
TPAKP	0.001107	0.003625	0.305519	0.7614
PROFESP	0.006359	0.007621	0.834359	0.4085
GR	-0.339922	1.240187	-0.274089	0.7853
PDRB	-0.036514	0.083611	-0.436712	0.6644

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *Glejser*, diketahui bahwa seluruh nilai probabilitas lebih dari 0.05 (Prob. > 0.05). Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sejalan dengan pandangan [38], kondisi homoskedastisitas menjadi syarat penting agar estimasi OLS efisien dan hasil uji statistik dapat diinterpretasikan secara valid.

Tabel 6. Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.25218	2.062028	5.941813	0.0000
IPM	-0.031245	0.011733	-2.663014	0.0107
TPAKP	0.030757	0.006577	4.676633	0.0000
PROFESP	-0.080368	0.013827	-5.812235	0.0000
GR	-1.208362	2.250088	-0.537029	0.5939
PDRB	-0.017237	0.151697	-0.113627	0.9100

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.125677	R-squared	0.968664
Mean dependent var	7.278922	Adjusted R-squared	0.958915
S.D. dependent var	0.715949	S.E. of regression	0.145119
Akaike info criterion	-0.810202	Sum squared resid	0.947684
Schwarz criterion	-0.286616	Log likelihood	39.30605
Hannan-Quinn criter.	-0.605398	F-statistic	99.35964
Durbin-Watson stat	2.099998	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: EViews 12 (data diolah)

Merujuk pada hasil estimasi Tabel 5. Diperoleh nilai Prob (*F-statistik*) sebesar 0.0000 kurang dari alpha 0.05, yang menandakan bahwa secara simultan variabel indeks pembangunan

manusia, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, pekerja profesional perempuan, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Gini Ratio berkontribusi secara nyata terhadap jumlah penduduk miskin. Di sisi lain, hasil hitung koefisien determinasi (R^2) menunjukkan angka sebesar 0.9589. Angka ini menunjukkan bahwa 95,89% perubahan pada variabel jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh seluruh variabel di dalam model penelitian, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) dan tenaga profesional perempuan (PROFESP), serta PDRB dan Gini Ratio sebagai variabel kontrol. Sementara sisanya 4,11% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Nilai R^2 yang tinggi memang menandakan bahwa model ini mampu menggambarkan sebagian besar variasi data, tetapi [41] menekankan bahwa nilai R^2 yang tinggi tidak otomatis berarti model sudah baik secara substansi. Model yang baik tetap harus dilihat dari kesesuaian teori, signifikansi variabel, dan relevansi hasil.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan nilai koefisien sebesar -0.0312 dengan nilai probabilitas 0.0107. Hal ini membuktikan bahwa IPM membawa pengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Pola hubungan tersebut sejalan dengan teori modal manusia (*Human Capital Theory*) yang menjelaskan bahwa ketika kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat membaik, produktivitas serta pendapatan individu akan ikut meningkat. Peningkatan produktivitas ini secara otomatis akan menekan jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang lambat laun akan berkurang. Fenomena ini terlihat di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, di mana peningkatan IPM selama periode 2019-2024 diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin. [41] Menemukan bahwa dimensi IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ketika sektor pendidikan meningkat, masyarakat mampu memiliki keterampilan individu agar mampu berkompetitif dalam persaingan tenaga kerja. Di sisi lain, kesehatan yang terjaga membuat tenaga kerja lebih produktif. Menurut [42], kondisi kesehatan yang buruk akan menurunkan kualitas modal manusia, seperti anak yang mengalami stunting cenderung kesulitan belajar, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan sulit. Dampaknya, kemiskinan akan terus berlanjut antargenerasi. Faktor pemicu lainnya adalah stabilitas pendapatan yang memperkuat daya beli masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar seperti mendapatkan pendidikan layak

dan akses kesehatan yang baik. Hal ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus meminimalisasi tingkat kemiskinan.

3.2.2 Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan terhadap Kemiskinan

Secara statistik, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAKP) mencatat nilai koefisien 0.0307 dengan signifikansi pada nilai probabilitas 0.0000. Temuan statistik ini membuktikan bahwa TPAKP justru memiliki hubungan positif dan signifikan dengan jumlah penduduk miskin. Kenaikan TPAKP sebesar 1% berkaitan dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 3,07%. Bahwa tingginya TPAKP tidak semata-mata berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk miskin, sebab kualitas pekerjaan pada perempuan masih relatif rendah. Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa TPAKP meningkat pada periode 2019-2024 dari 55,07% menjadi 60,64%, namun penurunan jumlah penduduk miskin relatif kecil. Penyebab utamanya adalah mayoritas tenaga kerja perempuan masih berada di sektor informal dengan minim, sehingga kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga terbatas. Fenomena serupa terlihat di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana TPAKP lebih tinggi, yaitu dari 59,74% pada tahun menjadi 70,40% pada tahun 2024 dalam periode yang sama, tetapi jumlah penduduk miskin tetap tinggi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan yang tinggi tanpa dukungan kualitas pekerjaan tidak cukup kuat untuk menekan jumlah penduduk miskin. Fenomena ini mencerminkan adanya kecenderungan distress-driven labor force participation, sebuah kondisi di mana partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja didorong oleh tekanan ekonomi rumah tangga. Tingginya partisipasi perempuan pada sektor informal dengan upah rendah belum efektif dalam memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dalam pengurangan kemiskinan [19]. Temuan [7] menegaskan bahwa banyak perempuan bekerja bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan untuk menopang ekonomi keluarga. [19] Menunjukkan bahwa upah tenaga kerja perempuan yang relatif kecil terutama pada sektor informal membuat kontribusi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga tidak cukup signifikan untuk menekan jumlah penduduk miskin. Selain itu, [24] menekankan bahwa partisipasi kerja perempuan tanpa dukungan kualitas pekerja tidak cukup kuat, sehingga pendidikan perempuan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kualitas manusia.

3.2.3 Pengaruh Tenaga Profesional Perempuan terhadap Kemiskinan

Variabel pekerja profesional perempuan (PROFESP) memiliki nilai koefisien sebesar -0.0803 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000. Hasil ini membuktikan bahwa proporsi pekerja profesional berpengaruh negatif sekaligus signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskin. Kenaikan 1 poin persentase pekerja profesional perempuan akan berkorelasi dengan penurunan

jumlah penduduk miskin sekitar 8,03%. Temuan ini menegaskan bahwa perempuan yang memiliki pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melainkan juga memperluas peluang pemenuhan kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, proteksi kesehatan, dan kelayakan hidup. Dengan pendapatan yang memadai, perempuan dapat menyekolahkan anak-anak, memberikan layanan kesehatan yang layak, serta memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, sehingga kemiskinan dapat diputus antargenerasi [43]. Sejalan dengan itu, [16] menekankan bahwa pendidikan dan jaminan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan di sektor formal, sementara [44] menjelaskan bahwa perempuan yang terjebak di sektor informal dengan upah rendah lebih rentan mengalami kemiskinan. Dengan demikian, bukan sekadar jumlah perempuan yang bekerja yang menentukan, melainkan kualitas profesi dan karakteristik pekerjaan. Perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional dengan upah yang layak mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka kemiskinan, karena pendapatan yang lebih tinggi membuka peluang untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga serta generasi berikutnya [19]. Maka dari itu, meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja tidak semata-mata mampu menekan angka jumlah penduduk miskin. Namun, memastikan perempuan memperoleh kesempatan untuk masuk ke pekerjaan formal dengan upah yang layak. Ketika didorong oleh pendidikan dan kesehatan yang baik, perempuan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga, sehingga partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja menjadi fondasi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4 PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa penurunan jumlah penduduk miskin lebih ditentukan oleh kualitas pembangunan manusia dan profesi perempuan dibandingkan sekadar tingginya partisipasi kerja perempuan. Peningkatan IPM serta proporsi pekerja profesional perempuan terbukti secara signifikan menekan angka kemiskinan, sementara partisipasi di sektor informal yang berupah rendah tidak efektif. Implikasinya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pendidikan (tidak hanya sekolah formal, tetapi juga sekolah nonformal seperti pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri), meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja informal perempuan, dan meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan formal agar kontribusi mereka benar-benar efektif dalam pengentasan kemiskinan. Misalnya, menyediakan fasilitas penitipan anak yang layak dan aman serta memberikan insentif bagi perusahaan yang memperluas kesempatan kerja layak bagi perempuan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan wilayah yang hanya mencakup 10 provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi pada periode 2019–2024 serta variabel terbatas

pada IPM, TPAKP, tenaga profesional perempuan, PDRB, dan Gini Ratio. Faktor lain seperti kualitas institusi, kebijakan sosial, dan dinamika pasar kerja belum terakomodasi. Oleh karena itu, penelitian berikutnya disarankan memperluas wilayah kajian, menambah variabel struktural, serta menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif agar rekomendasi kebijakan lebih komprehensif dan relevan bagi strategi pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- D. A. Huwaida, L. Aini, H. Wulandari, R. Widyaningrum, and A. Y. Nadhiroh, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Pada 12 Provinsi Di Indonesia Tahun 2019-2023,” 2025. [Online]. Available: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab>
- M. Madaliyah and S. Rohmah, “Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,” 2024.
- L. N. Azizah, J. Rikky, S. Pasaribu, I. Hutagalung, A. A. Purba, and S. A. Sinaga, “Analisis Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022,” *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, vol. 2, no. 1, pp. 25–32, 2023, doi: 10.5281/zenodo.11641452.
- D. Wijayanti, “Analisis Determinan Kemiskinan Sebuah Studi Empiris di Pulau Jawa Tahun 2019-2023,” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, vol. 22, no. 1, 2025, [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id>.
- M. R. Farkhan and Ir. M. I. Hasmarini, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2021,” 2023.
- E. Nainggolan, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019),” *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, vol. 6, 2020.
- M. Alhudrori, “Pengaruh Ipm, Pdrb Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi,” *J. Econ. Bus.*, vol. 1, no. 1, p. 113, Sep. 2017, doi: 10.33087/ekonomis.v1i1.12.
- B. W. Tirta, R. Noor, and H. Putri, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur,” *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, vol. 18, no. 2, Aug. 2025, doi: 10.46306/jbbe.v18i2.
- D. P. Y. Pardita, I. G. W. Arjawa, and I. M. Setena, “The Development of Human and Poverty in Indonesia,” European Alliance for Innovation n.o., Apr. 2025. doi: 10.4108/eai.27-10-2023.2352808.

- I. Wulandari and A. A. N. Pratama, “Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2010-2021,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 3, p. 3301, Nov. 2022, doi: 10.29040/jiei.v8i3.6501.
- E. Foster, D. Jolliffe, C. Ibarra, C. Lakner, and S. Tetteh-Baah, “Global Poverty Revisited Using 2021 PPPs and New Data on Consumption,” 2025. [Online]. Available: <http://reproducibility.worldbank.org>,
- Herman, “Pengaruh Kenaikan PDRB Harga Konstan Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kota Pekanbaru,” 2025.
- Sayifullah and T. R. Gandasari, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, vol. 6, no. 2, Oct. 2016, [Online]. Available: <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>
- I. Laelawati, “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Angkatan Kerja, Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2010 -2019,” 2021.
- C. L. K. Nawarathna, “The Impact of Female Labor Force Participation on Enhancing Human Development Throughout the Stages of Global Demographic Dividends,” 2025, doi: 10.47772/IJRISS.
- S. A. Susilawati and W. Perwithosuci, “Female Labor Force Participation in Indonesia: The Role of Education, Wage, and Health,” 2025.
- N. Murialti, M. F. Hadi, and M. Asnawi, “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Kabupaten Rokan Hilir (2010-2021),” *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, vol. 12, no. 2, pp. 229–237, Dec. 2022, doi: 10.37859/jae.v12i2.4256.
- H. Shiddiqoh, “Keterkaitan Antara Peranan Wanita Dengan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia,” May 2016.
- A. K. Nafisah and M. Anas, “Pengaruh Ketenagakerjaan Perempuan terhadap Kemiskinan di Indonesia,” 2024. [Online]. Available: <https://jsr.lib.ums.ac.id/index.php/determinasi/page45>
- M. Suhesti and M. Anas, “Pengaruh Ketimpangan Gender, Upah, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia,” *Indonesian Journal of Digital Business*, Feb. 2025.
- T. E. Rahmayati, “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier,” 2020.
- R. K. Kaban and M. H. Robertus, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

- Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021,” *Diponegoro Journal of Economics*, vol. 12, no. 3, pp. 37–46, Sep. 2023, doi: 10.14710/djoe.39623.
- F. Z. AlChasanah and Ekaria, “Determinan Kemiskinan Multidimensi Perempuan Berusia Produktif di Pulau Papua Tahun 2020 (Determinants of Multidimensional Poverty of Women of Productive Age in Papua Island in 2020),” 2020.
- F. D. Huzaimi and K. Arisetyawan, “Analisis Partisipasi Perempuan di Sektor Informal,” 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/independent>
- A. A. Azmi and V. H. Cholily, “Analisis Pengaruh Partisipasi Tenaga Kerja dan Pendidikan Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010-2020,” *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, vol. 2, no. 1, pp. 37–47, Mar. 2023, doi: 10.32734/ljsp.v2i1.11131.
- M. P. ; S. S. C. Todaro, *Economic Development*, 13th edition. Harlow: Pearson, 2020.
- D. R. P. Artha and T. Dartanto, “The Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia: Measurements, Determinants and its Policy Implications,” 2018.
- T. Nursyamsiah, Mohd. N. Mohd. Arshad, Z. Z. Idris, and S. N. Syed Salleh, “What Drives Female Labour Force Participation in Indonesia? A Systematic Literature Review,” *e-Bangi Journal of Social Science and Humanities*, vol. 22, no. 3, Aug. 2025, doi: 10.17576/ebangi.2025.2203.27.
- A. E. Pratiwi, D. Wulandari, E. T. Hutabarat, and S. T. Silaban, “Tinjauan Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 2, pp. 550–553, Dec. 2024, doi: 10.5281/zenodo.14560358.
- K. A. Matondang, N. F. Nasution, Z. H. Hasibuan, and A. P. Siagian, “Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara,” *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, Sep. 2024.
- A. Adim, “Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2018-2022,” 2024, doi: 10.54471/idarotuna.v5.
- R. Nopiah, E. D. Anggraini, and P. A. Islami, “Woman’s Labor Participation and Household Welfare: An Empirical Study in Sumatera Island,” *Jurnal Kawistara*, vol. 14, no. 1, p. 72, May 2024, doi: 10.22146/kawistara.81011.
- R. Koto, E. Ridwan, and F. Muharja, “Analisis Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, pp. 607–612, Sep. 2025, doi: 10.37034/infeb.v7i3.1221.

- F. Hanum, "Study of Women's Roles in Poverty Reduction," *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, vol. 8, no. 2, pp. 194–205, Jun. 2025, doi: 10.15294/efficient.v8i2.20434.
- A. Putri, M. Fardani, N. Ignasha, N. Farliana, & Nurkomala, and A. Chairunnisa, "Pengaruh Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2023," 2025.
- Y. Nuraeni and I. L. Suryono, "Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 20, no. 1, Jun. 2021, doi: 10.35967/njip.v20i1.134.
- D. V. Panjaitan, N. Nuryartono, S. H. Pasaribu, and J. Lay, "The Impact of Female Labor Force Participation on Regional Economic and Income Convergence," *Jurnal UIN Jakarta Etikonomi*, vol. 24, no. 2, Sep. 2025, doi: 10.15408/etk.v24i2.41688.
- S. Astutiningsih, S. R. Budiani, S. R. Giyarsih, and D. Marwasta, "Partisipasi Kerja Perempuan dalam Sektor Informal di Kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dusun Tambakbayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 13, no. 1, pp. 83–92, Apr. 2024, doi: 10.23887/jish.v13i1.72652.
- D. N. ; P. D. C. Gujarati, *Basic Econometrics*, 5th edition. New York: McGraw-Hill, 2009.
- R. E. Agustina and A. Yahya, "Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia," *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, vol. 6, no. 1, pp. 98–108, Nov. 2022, doi: 10.32630/sukowati.v6i1.329.
- D. N. Gujarati, *Econometrics by Example*, 2nd ed. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi," Sep. 2017.
- D. Pardita, I. G. Arjawa, and I. M. Setena, "The Development of Human and Poverty in Indonesia," European Alliance for Innovation n.o., Apr. 2025. doi: 10.4108/eai.27-10-2023.2352808.
- A. K. Nafisah and M. Anas, "Pengaruh Ketenagakerjaan Perempuan terhadap Kemiskinan di Indonesia," 2024. [Online]. Available: <https://jsr.lib.ums.ac.id/index.php/determinasi•page45>
- S. Astutiningsih, S. R. Budiani, S. R. Giyarsih, and D. Marwasta, "Partisipasi Kerja Perempuan dalam Sektor Informal di Kawasan Pinggiran Kota Yogyakarta (Studi Kasus Dusun Tambakbayan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 13, no. 1, pp. 83–92, Apr. 2024, doi: 10.23887/jish.v13i1.72652